BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 31 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan status penggunaan barang milik daerah oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal barang milik daerah dimanfaatkan atau dioperasionalkan oleh pihak lain, maka barang milik daerah tersebut dicatat dalam daftar aset lain-lain pada Perangkat Daerah bersangkutan.

KETIGA : Mutasi barang milik daerah antar Perangkat Daerah setelah penetapan ini, dapat dilaksanakan dengan disertai berita acara serah terima antar Perangkat Daerah serta dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 31 /KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Inspektorat
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Badan Pendapatan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Badan Pendapatan Daerah
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Badan Kesbang dan Politik	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Badan Kesbang dan Politik
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Kesehatan
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
18.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Satuan Polisi PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19.	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Ketahanan Pangan
20.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
21.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Perkebunan dan Peternakan
22.	Dinas Perikanan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Perikanan
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
24.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Lingkungan Hidup
25.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
26.	Dinas Sosial	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Sosial
27.	Dinas Perhubungan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Perhubungan
28.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

31.	RSUD Alimuddin Umar	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 RSUD Alimuddin Umar
32.	Kecamatan Balik Bukit	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Balik Bukit
33.	Kecamatan Belalau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Belalau
34.	Kecamatan Sumber Jaya	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Sumber Jaya
35.	Kecamatan Way Tenong	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Way Tenong
36.	Kecamatan Sekincau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Sekincau
37.	Kecamatan Suoh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Suoh
38.	Kecamatan Batu Brak	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Batu Brak
39.	Kecamatan Sukau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Sukau
40.	Kecamatan Gedung Surian	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Gedung Surian
41.	Kecamatan Kebun Tebu	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Kebun Tebu,
42.	Kecamatan Air Hitam	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Air Hitam
43.	Kecamatan Pagar Dewa	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Pagar Dewa
44.	Kecamatan Batu Ketulis	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Batu Ketulis
45.	Kecamatan Bandar Negeri Souh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Bandar Negeri Souh
46.	Kecamatan Lumbok Seminung	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kec. Lumbok Seminung
47.	Kelurahan Pasar Liwa	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Kelurahan Pasar Liwa

65.	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Puskesmas Bandar Negeri Suoh
66.	Puskesmas Lumbok Seminung	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Puskesmas Lumbok Seminung
67.	Pengelola Barang	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2023 Pengelola Barang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN